

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah. Pemerintahan juga merupakan sebuah ilmu yang dapat menguasai, memimpin serta menyelidiki unsur – unsur yang keterkaitan antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif berhubungan dengan keserasian dalam dan hubungan antara masyarakat yang kepentingannya diwakili badan legislatif. Maka dari itu skripsi dengan judul komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari kajian ilmu pemerintahan.

Komunikasi yang dilakukan dengan terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat, keterbukaan informasi dan membangun rasa percaya perlu dibuat oleh setiap kader partai politik agar mampu mendapatkan dukungan penuh pada saat pemilihan umum yang akan dilaksanakan nantinya. Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada masyarakat ataupun pihak lain. Kegiatan ini dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial dan komunikasi politik ini dilakukan saat berkampanye atau yang lainnya, strategi komunikasi politik yang

dibangun oleh setiap partai sedari awal dibuat untuk mencapai dan mendapatkan dukungan penuh pada pemilihan umum.

Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern. Menurut Ramlan Surbakti (1992:199) Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi atau pesan. Reformasi telah membawa perubahan aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, dan aspek lainnya yang berubah semenjak terjadinya pergeseran struktur semenjak reformasi bergulir. Perubahan yang seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik dari pusat maupun daerah, mereka menuntut adanya sebuah pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis sesuai dengan harapan terciptanya sebuah kestabilan politik yang dinamis.

Komunikasi politik mempunyai arti yang sangat penting, terutama di era reformasi sekarang ini. Iklim keterbukaan dan demokratisasi yang dibangun, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, maupun pemilihan kepala daerah yang juga nantinya dilakukan secara langsung akan semakin menambah pentingnya arti komunikasi politik di Indonesia. Komunikasi politik sebagai suatu teori memang memiliki universalitas

atau keberlakuan secara umum. Akan tetapi sebagai suatu praktik, komunikasi tentu memiliki perbedaan-perbedaan sebagai akibat adanya perbedaan adat istiadat dan budaya organisasi, komunikasi politik itu sendiri di pengaruhi oleh sistem budaya dan sistem politik itu sendiri.

Strategi komunikasi politik menjadi hal yang penting bagi para aktor dan kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum terutama partai politik. Sebab keberhasilan partai dalam pemilu sangat ditentukan sejauh mana strategi komunikasi politiknya berfungsi. Selain itu juga berfungsinya komunikasi politik dengan baik akan menjadikan partai tersebut mampu bersaing dalam alam demokrasi yang semakin kompetitif (Bina et al : 83-109). Strategi komunikasi politik merupakan salah satu kunci keberhasilan partai politik dalam memenangkan pemilihan umum legislatif ini. Dengan mendulang perolehan suara yang besar itu membuktikan betapa besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut.

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan *public opinion* yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilih sangat besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu mengelolanya untuk menjadi

keputusan. Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan. (Mahkamah Konstitusi:7.)

Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia dan dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa yang harus menjalankan serta mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilihan umum berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 dengan asas LUBER JURDIL (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil).

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik

dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). (Dr.Muhadam Labolo:7-8.)

Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Menurut Dewi Kurniasih dan Tatik Rohmawati dalam jurnal pelaksanaan fungsi komunikasi politik bahwasanya partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satusatunya jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah. Pemerintahan juga merupakan sebuah ilmu yang dapat menguasai, memimpin serta menyelidiki unsur – unsur yang keterkaitan antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif berhubungan dengan keserasian dalam dan hubungan antara

masyarakat yang kepentingannya diwakili badan legislatif. Maka dari itu skripsi dengan judul komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari kajian ilmu pemerintahan.

Legislatif ialah kekuasaan yang memiliki tugas dalam menyusun serta membentuk perturan perundang-undangan. Legislatif merupakan badan deliberatif pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam membuat sebuah hukum. Dalam sistem pemerintahan parlemen, kekuasaan legislatif ialah sebagai lembaga tertinggi serta yang mengangkat lembaga eksekutif. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan legislatif merupakan perwakilan pemerintah yang sama serta bebas dari lembaga eksekutif.

Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih, secara umum pemilihan umum yang berlangsung di Kabupaten Purwakarta saat itu diikuti oleh 20 partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai yang ikut berkontestasi pada pemilihan umum legislatif periode 2019 – 2024, Partai Keadilan Sejahtera ikut andil berpartisipasi pada pemilihan umum 2019 serta itu juga sebagai ajang menunjukkan seberapa efektif komunikasi politik yang dikaitkan dengan teori bentuk – bentuk komunikasi politik yang dikemukakan oleh Anwar Ariffin melalui retorika politik, agitasi politik, propaganda, *public relations*, kampanye politik, lobi politik maupun media massa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu pada Partai Keadilan

Sejahtera mengikuti pemilihan umum legislatif di periode 2014 – 2019 akan tetapi tidak ada satupun perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada periode 2014 – 2019. Begitu menarik rasanya mengapa Partai Keadilan Sejahtera yang gagal pada periode 2014 – 2019 kemudian memberikan target awal untuk memenangkan 9 kursi pada pemilihan umum legislatif periode 2019 – 2024.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlepas dari peran Partai Keadilan (PK). Perubahan PK menjadi PKS dikarenakan pada saat pemilu tahun 1999, PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%. Kondisi tersebut mengharuskan PK berganti nama serta lambang untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003 (Setya:2009 dalam jurnal Sumartias, Islam, Sunan, Yogyakarta, & Padjadjaran, n.d.)

Momentum pemilihan umum legislatif 2019 yang telah terlaksana tahun lalu membuat Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta gagal pada periode 2014 – 2019 kemudian berhasil mendapatkan 4 kursi untuk di Kabupaten Purwakarta pada periode 2019 - 2024, berikut perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Keadilan Sejahtera dari setiap Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat:

**Tabel 1.1**

Tabel Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
1.	Kota Bandung	13 Kursi
2.	Kota Bogor	10 Kursi
3.	Kota Bekasi	12 Kursi
4.	Kota Depok	12 Kursi
5.	Kota Banjar	3 Kursi
6.	Kota Cirebon	3 Kursi
7.	Kota Cimahi	7 Kursi
8.	Kota Sukabumi	5 Kursi
9.	Kota Tasikmalaya	4 Kursi
10.	Kabupaten Purwakarta	5 Kursi
11.	Kabupaten Bogor	9 Kursi
12.	Kabupaten Sukabumi	7 Kursi
13.	Kabupaten Bandung	10 Kursi
14.	Kabupaten Cianjur	5 Kursi
15.	Kabupaten Garut	5 Kursi
16.	Kabupaten Tasikmalaya	3 Kursi
17.	Kabupaten Subang	5 Kursi
18.	Kabupaten Ciamis	5 Kursi
19.	Kabupaten Kuningan	7 Kursi
20.	Kabupaten Majalengka	5 Kursi
21.	Kabupaten Cirebon	5 Kursi
22.	Kabupaten Sumedang	5 Kursi
23.	Kabupaten Indramayu	2 Kursi
24.	Kabupaten Karawang	6 Kursi
25.	Kabupaten Bandung Barat	8 Kursi
26.	Kabupaten Bekasi	10 Kursi
27.	Kabupaten Pangandaran	3 Kursi

(Sumber: Hasil rekap berita disetiap Kabupaten/Kota oleh Peneliti 2020)

Jika melihat pada hasil pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jawa Barat kita dapat memperhatikan bahwasanya ada ketidaksesuaian dari hasil pemilihan umum legislatif yang terjadi di Kabupaten Purwakarta mengingat Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta menargetkan untuk mengambil 9 kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi saat melihat hasil

perolehan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlihat bahwasanya PKS gagal untuk mencapai tujuan diawal yaitu 9 kursi pada pemilihan umum legislatif. Tentu saja hasil tersebut cukup mengecewakan mengingat apa yang dilaksanakan dan digembar gemborkan di media Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta begitu percaya diri akan mendapatkan 9 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal tersebut akan sangat berkaitan dengan komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta sehingga gagal mendapatkan 9 kursi.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta berhasil meraih 5 kursi pada pemilihan umum legisatif di Kabupaten Purwakarta yang berarti perolehan tersebut sama dengan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya, di bawah Kabupaten Purwakarta dan Kota Tasikmalaya ada beberapa Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan perolehan suara yg lebih rendah. Jika melihat dari Kabupaten terdekat dari Purwakarta yaitu Kabupaten Subang mereka memperoleh 5 Kursi kemudian Kabupaten Karawang memperoleh 6 Kursi jika dilihat dari perolehan kursi dari Kabupaten terdekat Purwakarta jumlah raihan kursi yang didapat lebih baik dari yang didapatkan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta.

Melihat komunikasi politik yang diterapkan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Purwakarta adanya ketidakefektifan dalam menerapkan komunikasi politik yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat Purwakarta memilih Partai Keadilan Sejahtera. Pertama retorika politik, kunci dalam melaukan komunikasi politik itu ialah tentang bagaimana menggunakan seni dalam berbicara yang artinya kemampuan seni dalam berbicara untuk meyakinkan masyarakat di

Kabupaten Purwakarta dirasa kurang terpenuhi pada proses komunikasi politik di pemilihan umum legislatif sehingga menyebabkan perolehan kursi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedua agitasi politik yakni untuk proses menggerakkan massa melalui lisan ataupun tulisan dirasa kurang terpenuhi sehingga menyebabkan kurangnya rasa empati masyarakat Kabupaten Purwakarta yang kemudian menyebabkan tidak terdongkraknya elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga adapun propaganda yang dilakukan dirasa tidak kurang dalam memberikan informasi untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat agar mau memilih Partai Keadilan Sejahtera maka dari itu kurangnya aspek propaganda ini membuat masyarakat Purwakarta tidak tertarik untuk memilih.

Kemudian keempat yaitu *public relations politics* yaitu hubungan yang terjalin antara Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat kurang harmonis sehingga tidak adanya rasa saling percaya antara Partai Keadilan Sejahtera serta masyarakat hal itu menyebabkan rasa enggan timbul di masyarakat. Kelima lobi politik yang dirasa tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap suara yang dihasilkan pada pemilihan umum legislatif ini menjadi hal yang harus diperbaiki kedepannya. Keenam kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Purwakarta dirasa kurang efektif karena tidak menjangkau masyarakat yang jauh dari perkotaan sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang Partai Keadilan Sejahtera. Serta yang terakhir ialah media massa yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera tidak menjangkau semua umur sehingga kurangnya apresiasi dari aspek ini membuat kaum millennial maupun boomer yang menggunakan media sosial kurang tergerak atau tidak

tertarik akan postingan maupun ajakan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan adanya perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif 2019 itu menandakan bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera memiliki suara untuk didengar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga dapat memberikan sumbangsih atau ide pokok gagasan dalam bentuk kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena dengan adanya keterwakilan dari mereka yang terpilih maka Partai Keadilan Sejahtera memiliki kekuatan di dalam untuk mengeluarkan sebuah produk kebijakan publik atau bisa memberikan sebuah usulan untuk membuat sebuah kebijakan publik. Lantas akan begitu saling keterkaitan dengan bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan komunikasi politik untuk menarik minat pemilih karena dengan ada banyaknya wakil dari partai akan memberikan dampak yang sedikit banyak terhadap kebijakan yang akan dibuat nantinya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema komunikasi politik ini sebagai referensi dan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan diantaranya: Muhamad Rosit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik departemen ilmu komunikasi kekhususan manajemen komunikasi politik Universitas Indonesia, strategi komunikasi politik dalam pilkada studi kasus kemenangan pasangan kandidat ratu atut dan rano karno pada pilkada banten 2011. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa strategi

komunikasi politik yang dilakukan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada Banten 2011, untuk mengetahui dan menganalisa apakah langkah-langkah yang dilakukan tim sukses koalisi partai dan organisasi-organisasi yang menjadi alat pemenangan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011 dan untuk mengetahui dan menganalisa strategi komunikasi politik yang dilakukan partai pengusung dan partai pendukung yang terwadahi dalam tim sukses koalisi partai dan tim relawan dalam proses pemenangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017. (Rosit, 2012)

Fadly Jamil, Ilmu komunikasi fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar, Strategi Komunikasi Politik Pilkada Gowa 2015 (Studi Kasus Kemenangan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo S.H Dan H Abd Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si). Tujuan Penelitian untuk mengetahui pola penentuan strategi komunikasi politik kemenangan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo., S.H dan H. Abdul Rauf Malaganni., S.Sos., M.Si di pilkada Kabupaten Gowa 2015. Dan untuk mengetahui bentuk penerapan strategi komunikasi politik kemenangan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo, S.H dan H. Abdul Rauf Malganni. S.Sos., M.Si di pilkada Kabupaten Gowa 2015. (Jamil, Komunikasi, Dakwah, Komunikasi, & Makassar, 2016). Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Zahlul Armi, Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri ar-raniry banda aceh, strategi komunikasi politik pasangan calon walikota banda aceh pada pilkada 2017 (studi pada tim pemenangan aminullah usman dan zainal arifin). Tujuan Penelitian untuk mengetahui strategi komunikasi politik

yang dijalankan tim pemenangan pasangan calon walikota Aminullah Usman dan Zainal Arifin, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan peluang proses komunikasi politik yang dijalankan tim pemenangan pasangan calon walikota Aminullah Usman dan Zainal Arifin. (Armi, 2018)

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah subjek yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada pemenangan setiap pemilihan umum kepala daerah sedangkan pada penelitian kali ini peneliti lebih memfokuskan pada komunikasi partai politik yang menjadi objek utama penelitian.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas rasanya begitu menarik mengapa Kabupaten Purwakarta tidak berhasil pada pemilihan umum legislatif periode 2014 – 2019 kemudian memberikan target 9 kursi pada pemilihan umum legislatif pada periode 2019 - 2024 dimana hanya menghasilkan 5 kursi yang artinya Partai Keadilan Sejahtera gagal memenuhi terget tersebut, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Purwakarta.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka saya merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten

Purwakarta dilihat dari retorika politik, agitasi politik, propaganda, *public relations politics*, kampanye politik, lobi politik dan media massa?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta, adapun tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui retorika politik PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui agitasi politik PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui propaganda PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui *public relations politics* PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui kampanye politik PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui lobi politik PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.
7. Untuk mengetahui media massa PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini:

1. Guna Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori komunikasi politik dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Guna Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan peneliti tentang strategi komunikasi politik. Selain itu peneliti ingin mengetahui serta membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Purwakarta

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak pada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk lebih meningkatkan militansi yang lebih kuat lagi agar menjadi percontohan Kader PKS lainnya.

- c. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan komunikasi politik agar kedepannya pergerakan PKS lebih massif lagi.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat Kabupaten Purwakarta memahami pentingnya mengetahui perihal strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh setiap partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera.

